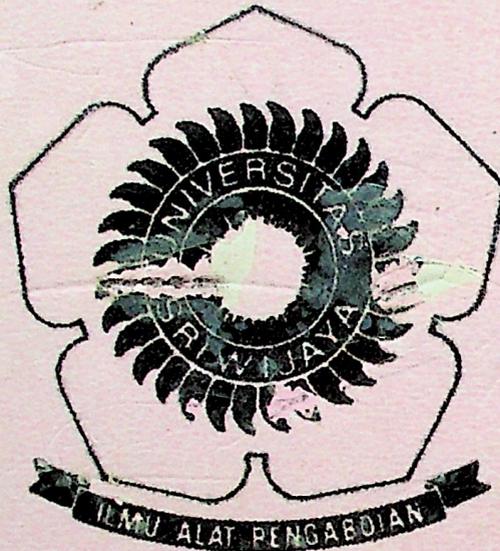


**PERSEPSI MAHASISWA DI PERKOTAAN
MENGENAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF**

(Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang)



Disusun oleh :

VIERONICA VARBI SUNUNIANI

NIM : 07043102007

Jurusan : Sosiologi

Jenjang : Strata Satu

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

8
351.003 2307
Sun
2008



**PERSEPSI MAHASISWA DI PERKOTA
MENGENAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF**

(Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang)

R. 1705
I. 17433



Disusun oleh :

VIERONICA VARBI SUNUNIANTI

NIM : 07043102007
Jurusan : Sosiologi
Jenjang : Strata Satu

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2008**

**PERSEPSI MAHASISWA DI PERKOTAAN
MENGENAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF**
(Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Diajukan Oleh :

VIERONICA VARBI SUNUNIANI

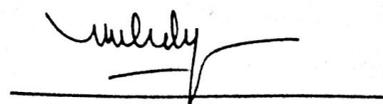
07043102007

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Inderalaya, April 2008

Pembimbing I
Drs. Tri Agus Susanto, M.S
NIP. 131 126 818



Pembimbing II
Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 131 476 136



**PERSEPSI MAHASISWA DI PERKOTAAN
MENGENAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI LEMBAGA
EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF**

(Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang)

SKRIPSI

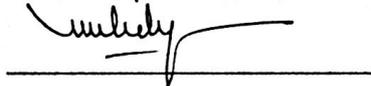
**Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji pada tanggal 16 Mei 2008
dan telah dinyatakan Berhasil**

Susunan Dewan Penguji

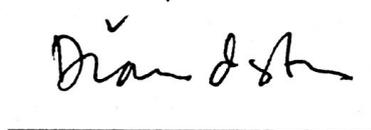
**Drs. Tri Agus Susanto, MS.
Ketua**



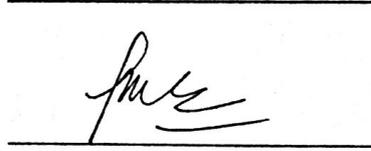
**Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
Anggota**



**Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
Anggota**



**Dra. Hj. Retna Mahriani, M.Si
Anggota**



**Indralaya, Mei 2008
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Dekan

**Drs. H. SLAMET WIDODO, MS, MM
NIP.131 476 170**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Bapa di Surga atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif” khususnya pada mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Kota Palembang.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluargaku yang tercinta Bapak FX. Supargino (RIP), Mama Dionysia Ruth Biarsi, Mas Petrus Permana, Mbak Pia Pretty Pininta serta Adikku Leonilla Lucilla Larasati.
2. Bapak Drs. H. Slamet Widodo, M.S., M.M. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Eva Lidya, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Armansyah Edi Utama, S.Sos. selaku Kasubag Pendidikan FISIP Unsri.

7. Para Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang, Badan Kepegawaian Kota Palembang, Sekretariat DPRD Kota Palembang, Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Pengadilan Tinggi Palembang, Koordinator Kopertis Wilayah II, Bapak/Ibu Staf STIE Musi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma dan Universitas Tridinanti.
8. Ibu Dra. Hj. Retna Mahriani, M.Si dan Ibu Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si selaku dewan penguji, bapak/ibu dosen beserta staf FISIP Unsri.
9. Mas Bambang, seluruh teman-teman di FISIP Unsri khususnya (Harris, Erwan, Alfian, Agus, Iid, Deska, Gita dan Pipit Yunita), Sihono, Meidi, kak Reddy '03, kak Wawan'02 juga kepada pihak-pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk pengembangan skripsi ini lebih lanjut.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Inderalaya, April 2008

Penulis

ABSTRAK

Pemimpin perempuan dalam masyarakat sedikit jumlahnya, hal ini karena sempitnya kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke ruang publik dan juga adanya pandangan *stereotype* yang turut merendahkan perempuan. Pola pikir mahasiswa yang merupakan tolak ukur kemajuan bangsa mendorong peneliti untuk mengetahui persepsinya mengenai kepemimpinan perempuan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa tersebut. ✓

Tujuan penulisan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsinya. Manfaat teoritis penulisan sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan di bidang sosiologi dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan sosial. Manfaat praktisnya diharapkan hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan/isu perempuan serta membantu para perempuan agar lebih terbuka pemikirannya untuk memperjuangkan haknya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis induktif. Lokasi penelitian berada di STIE Musi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma dan Universitas Tridinanti Palembang dengan informan adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta minimal semester empat dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan universitas. Pengumpulan data menggunakan *indepth interview*. *Guided interview* digunakan untuk mempermudah pengumpulan data. Proses analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil di lapangan ditemukan bahwa persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif lebih baik dalam kerjasama, berdiskusi, berkoordinasi, melayani, membimbing, perhatian, pengawasan, kerja lebih efektif, lebih peka pada keadaan/lingkungan yang terjadi serta lebih dapat berlaku adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi diantaranya faktor pemersepsi yang meliputi minat/kepentingan, pengalaman dan harapan; faktor objek dan faktor situasi sosial.

Kata Kunci : *Persepsi, Mahasiswa dan Kepemimpinan Perempuan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	9
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	9
1.3.2.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.3.2.2 Manfaat Praktis.....	10
1.4 Kerangka Pemikiran	10
1.4.1 Persepsi Mahasiswa	10
1.4.2 Kepemimpinan Perempuan.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	24
1.5.1 Desain Penelitian.....	24



1.5.1.1 Lokasi Penelitian.....	25
1.5.1.2 Sifat dan Jenis Penelitian.....	25
1.5.2 Batasan Konsep.....	26
1.5.3 Penentuan Informan.....	27
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
1.5.4.1 Unit Analisis Data.....	27
1.5.4.2 Data dan Sumber Data.....	28
1.5.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	28
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	29
1.5.6 Sistematika.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1 Keadaan Kotamadia Palembang.....	44
3.2 Letak dan Luas Kota Palembang.....	44
3.3 Pemerintahan Kota Palembang	45
3.3.1 Lembaga Legislatif.....	45
3.3.2 Lembaga Eksekutif.....	46
3.3.3 Lembaga Yudikatif.....	47
3.4 Jumlah Penduduk Kota Palembang.....	48
3.5 Perguruan Tinggi Swasta yang Dijadikan Tempat Penelitian.....	50
3.5.1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang.....	50

3.5.2	Universitas Muhammadiyah Palembang.....	54
3.5.3	Universitas Bina Darma Palembang.....	58
3.5.4	Universitas Tridinanti Palembang.....	63
3.6	Karakteristik Informan	68

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

4.1	Pengetahuan Mahasiswa Mengenai	
	Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif	71
4.1.1	Pengetahuan Mahasiswa Mengenai	
	Lembaga Eksekutif.....	71
4.1.2	Pengetahuan Mahasiswa Mengenai	
	Lembaga Legislatif.....	75
	4.1.2.1 Pengetahuan Mahasiswa Mengenai	
	Tugas dan Fungsi Lembaga Legislatif.....	75
	4.1.2.2 Pengetahuan Mahasiswa Mengenai	
	Kuota 30% Bagi Perempuan di Parlemen	78
4.1.3	Pengetahuan Mahasiswa Mengenai	
	Lembaga Yudikatif.....	83
4.2	Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepemimpinan Perempuan	86
4.2.1	Kemampuan Pemimpin Perempuan dalam Berkomunikasi	88
4.2.2	Kemampuan Pemimpin Perempuan di	
	Bidang Pengetahuan	93

4.2.3	Kemampuan Pemimpin Perempuan dalam Memanajemen Organisasi.....	97
4.3	Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.....	101
4.3.1	Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	101
4.3.2	Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Legislatif.....	104
4.3.3	Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Yudikatif.....	107
4.4	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi Mahasiswa Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.....	110

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	120
5.2	Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA 122

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Propinsi Sumatera Selatan 2004 dan 2005.....	2
Tabel 3.1	Luas Daerah dan Pembagian Administrasi Menurut Kecamatan di Kota Palembang	45
Tabel 3.2	Komposisi Keanggotaan DPRD Kota Palembang Periode 2004-2009.....	46
Tabel 3.3	Jumlah PNS/CPNS Non Guru Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.....	47
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Palembang Tahun 2006.....	48
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palembang Tahun 2006.....	49
Tabel 3.6	Jumlah Mahasiswa STIE Musi Tahun Ajaran 2007/2008.....	52
Tabel 3.7	Jumlah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2006/2007.....	57
Tabel 3.8	Jumlah Mahasiswa Universitas Bina Darma Palembang Tahun 2007/2008.....	62
Tabel 3.9	Jumlah Mahasiswa Universitas Tridinanti Palembang Tahun 2006/2007.....	67
Tabel 3.10	Data Informan Penelitian.....	69

**Tabel 4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan
Persepsi Generasi Muda Terdidik Mengenai Kepemimpinan
Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.....111**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepemimpinan laki-laki cenderung lebih diterima dalam masyarakat daripada perempuan. Hal ini terlihat dari terpilihnya 10 orang perempuan atau 15,4% dari 65 orang pada pemilu 2004 di parlemen Sumatera Selatan (Sumsel) padahal target yang ditentukan sebesar 30% (Sartika. 2007 : 10). Selain itu, sampai saat ini minimnya jumlah politisi perempuan dari hampir semua lembaga pengambil keputusan juga diungkapkan oleh Ani Widyani Soetjipto (2005 : 20).

Adapun yang menyebabkan sedikitnya perempuan dapat menempati posisi sebagai pemimpin di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yaitu kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut relatif lebih kecil kemungkinannya untuk diperoleh perempuan dibandingkan kesempatan yang didapat laki-laki. Hal ini dipertegas dalam harian *Kompas* (26 November 2007:33) yang menjelaskan bahwa semakin tinggi dan semakin penting suatu posisi di ruang publik, semakin sedikit jumlah perempuan. Saat ini kuota anggota Legislatif pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla untuk perempuan ternyata hanya terisi 11%. Padahal dalam UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap partai politik (parpol) peserta pemilu dapat mengajukan anggota Legislatif Tingkat Pusat (DPR), Tingkat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD

Kabupaten atau Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), permasalahan mengenai bidang ketenagakerjaan bisa dilihat dari tingkat Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Provinsi Sumsel tahun 2004-2005 yang memperlihatkan bahwa dalam dunia kerja masih di dominasi oleh laki-laki. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak di bidang tenaga profesional, tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha jasa. Sedangkan laki-laki mendominasi pada tingkat tenaga kepemimpinan, pejabat pelaksana TU, tenaga produksi, operator dan pekerja kasar, dan lainnya.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Propinsi Sumatera Selatan 2004 dan 2005

Jenis Pekerjaan	2004			2005		
	L	P	Total	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tenaga Profesional	1,55	2,85	2,03	2,59	5,53	3,63
Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0,19	-	0,12	0,53	0,09	0,37
Pejabat Pelaksana dan TU	2,89	2,37	2,70	3,64	2,63	3,28
Tenaga Usaha Penjualan	9,34	18,45	12,68	9,01	16,60	11,70
Tenaga Usaha Jasa	2,32	3,41	2,72	2,63	4,91	3,44
Tenaga Usaha Pertanian	63,48	69,16	65,56	61,00	65,25	62,51
Tenaga Produksi, Operator dan Pekerja Kasar	19,19	3,75	13,52	18,68	4,46	13,65
Lainnya	1,04	-	0,66	1,92	0,53	1,43
Jumlah	%	100	100	100	100	100
	N	1.957.581	1.134.159	3.091.740	1.952.378	1.068.643

Sumber : Situasi Ketenagakerjaan Prov Sumsel Tahun 2004, 2005 : 34

Kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam tulisan ini bukanlah kepemimpinan di sektor domestik, melainkan di sektor publik. Maksudnya perempuan pun diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur formal organisasi atau pekerjaan, bukan hanya sebagai pemimpin negara tapi juga memegang jabatan-jabatan strategis yang termasuk pengambil keputusan (*decision maker*).

Saat ini di Indonesia hanya ada empat orang perempuan diantara 36 menteri dalam kabinet, yakni : Marie Pangestu (Menteri Perdagangan), Sri Mulyani Indrawati (Ketua BAPPENAS), Siti Fadilah Supari (Menteri Kesehatan) dan Meuthia Farida Hatta Swasono (Menteri Pemberdayaan Perempuan). Anggota Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan perwira tinggi TNI/Polri di tingkat pusat juga minim perempuan; terlebih di tingkat daerah. Perempuan masih jauh dari jabatan politis (Gubernur/Wagub, Bupati, Walikota/Wakil) dan jabatan karir (Sekda/Asisten selaku Eselon I, Biro selaku Eselon II, Camat/Lurah). Saat ini, perempuan anggota DPR-RI hanya 42 orang (8,3%), MPR 60 orang (9,1%), DPA 1 orang (2,5%), MA 7 orang (14,8%), KPU 2 orang (18,1%), Wakil Gubernur 2 orang, Bupati/Wakil 7 orang, Duta Besar 4 orang, Ketua Umum Partai Politik 1 orang (www.bkkbn.go.id), Gubernur 1 orang (Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE dari provinsi Banten), Walikota 1 orang (Dr. Hj. Sylviana Murni dari Jakarta Pusat) dan Wakil Walikota 1 orang (Illiza Sa'aduddin Djamal dari Banda Aceh).

Anggota DPRD provinsi Sumsel tahun 2005 berdasarkan persentase jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan, sebanyak 55 orang dan 10 orang perempuan (Selayang Pandang DPRD Sumsel. 2006 : 29). Pegawai yang

menduduki Jabatan Eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel hanya empat (4) orang atau 23,53% perempuan dari 17 orang pejabat eselon. Hal di atas memperlihatkan bahwa walaupun perempuan masih sedikit atau tidak sebanyak laki-laki yang menjabat sebagai pemimpin tetapi setidaknya ada perwakilan dari perempuan yang artinya perempuan pun patut diperhitungkan.

Kondisi minimnya keterwakilan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif juga ada di tingkat Kota Palembang. Pada Lembaga Eksekutif, Pegawai Negeri Sipil (PNS) non guru sebagai pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Palembang posisi perempuan berjumlah 1.936 sedangkan laki-laki 2.211. Adapun pembagian unit kerjanya yakni sekretariat daerah (Setda) Kota dengan jumlah laki-laki 216 dan 74 orang perempuan, Dinas-dinas yang terdiri dari 1.779 orang laki-laki dan 1.621 orang perempuan serta Badan-badan/kantor, dimana jumlah laki-laki lebih sedikit yakni 216 orang dan 241 orang perempuan.

Sementara itu, kondisi yang serupa juga terjadi pada Lembaga Legislatif atau DPRD Kota Palembang. Susunan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi DPRD kota Palembang periode 2007/2008 ternyata hanya ada dua orang perempuan, yakni Dede Suginingsih dari Fraksi Golkar dan Hj. Sunnah NBU, SH, MH dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah keseluruhan anggota DPRD Kota Palembang adalah 45 orang.

Badan Yudikatif tingkat Kota Palembang pun mengalami hal yang serupa, jumlah hakim laki-laki lebih banyak daripada jumlah hakim perempuan, yakni 11

orang hakim laki-laki atau sekitar 78,57% berbanding 2 orang hakim perempuan atau 14,29%.

Menjadi pemimpin khususnya dalam Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif sangat diperlukan dukungan dari warga negara atau masyarakat, khususnya generasi muda terdidik. Generasi muda terdidik menjadi fokus perhatian dikarenakan mereka adalah sumber kemajuan suatu bangsa dalam hal ini pemikirannya dapat menjadi tolok ukur. Mahasiswa merupakan cikal bakal sarjana-sarjana yang akan dicetak oleh sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa dianggap memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih tinggi karena mereka telah menempuh jenjang yang diwajibkan pemerintah (wajib belajar 9 tahun). Dukungan dimulai dari anggapan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara, sehingga perempuan pun dapat menduduki posisi selayaknya laki-laki, terutama dalam hal kepemimpinan. Beberapa dari pemimpin perempuan, mereka yang dapat mencapai posisi kekuasaan politik dan kemampuan untuk mempertahankannya hampir tak dapat dilepaskan dari figur laki-laki, baik ayah atau suami. Artinya figur laki-laki merupakan faktor penting untuk membangkitkan emosi dan memperkuat basis dukungan massa.

Hambatan perempuan dalam peran kepemimpinan selama ini dikarenakan pandangan *stereotype* (pelabelan) yang sering kali bersifat negatif dan secara umum selalu menimbulkan ketidakadilan (Satria. 2003 : 6). Contohnya, label kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” sangat merugikan jika mereka hendak aktif dalam “kegiatan laki-laki” seperti kegiatan politik, bisnis, maupun birokrasi. Selain itu, pada tingkat sub-ordinasi juga sudah sejak dahulu ada

pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, dalam hal pembagian pekerjaan atau sejak tahap *recruitmen*. Perempuan ditempatkan pada bidang-bidang yang dianggap tak memerlukan kepandaian dan kecakapan mendapat pekerjaan di bidang kesekretariatan, logistik, pemasaran yang menuntut keelokan paras tubuh. Bidang politik pun menentang perempuan, hal ini bisa terlihat dari pernyataan ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahwa PPP tak mungkin dapat bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP) karena mereka tak bisa menerima seorang pemimpin perempuan, terlebih untuk jabatan memimpin bangsa dan negara Indonesia. Begitu pun dengan PAN yang “alergi” secara politik bila perempuan menjadi pemimpin (Soetjipto. 2005 : 16-17).

Jadi, hambatan-hambatan ini lebih diakibatkan oleh hambatan kultural dan politis, serta seringkali diakibatkan oleh keangkuhan laki-laki. Hambatan kultural bersumber dari ketidakberdayaan perempuan sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas perempuan sering terhambat oleh kultur tradisional yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum formal yang berlaku. Misalnya dalam hal pendidikan, anak laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan dengan anak perempuan sedangkan hambatan politis timbul sebagai akibat dari perwujudan arogansi laki-laki yang cenderung mendominasi dan menempati diri mengatasi perempuan. Padahal, kepemimpinan perempuan patut diperjuangkan karena keberadaan perempuan di DPR atau Legislatif antara lain dapat mempengaruhi arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dikutip dalam surat kabar *Kompas*, 26

November 2007 : 33 bahwa keberadaan perempuan di DPR telah menghasilkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Warga Negara, perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mahasiswa umumnya memiliki pendidikan yang lebih tinggi, sehingga pola pikirnya pun diharapkan telah mengalami perubahan dan kemajuan seiring dengan perkembangan zaman, terlebih di daerah perkotaan yang arus perubahan dan kemajuan teknologi sangat cepat. Sehingga diharapkan pandangan masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan yang cenderung negatif; misalnya sulit menerima seorang pemimpin berjenis kelamin perempuan dengan alasan karena perempuan kurang berpengalaman di ruang publik, anggapan bahwa dunia perempuan hanyalah di ruang domestik dan ada pula anggapan bahwa perempuan adalah *second class*; dapat diarahkan bahwa perempuan sebenarnya memiliki ciri kepemimpinan yang kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan dan cenderung kolektif sangat berpotensi dalam hal pengambil keputusan yang adil.

Pesatnya perkembangan dunia kerja saat ini akan mempengaruhi bagaimana pola berpikir, bersikap dan berpendapat terhadap sesuatu hal, sehingga pengalaman dan pengetahuan yang berbeda akan menentukan atau membuat suatu gagasan atau persepsi yang berbeda pula. Maka, pola pikir khususnya mahasiswa, tentang perempuan pun seharusnya berubah agar tidak ada lagi anggapan bahwa pemimpin harus laki-laki. Semua orang harus memberi kesempatan pada perempuan untuk menjadi pemimpin, bila perempuan tersebut mau dan berpotensi untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi pemimpin. Mahasiswa dituntut untuk

lebih peka terhadap masalah-masalah gender terlebih di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Empat Perguruan Tinggi Swasta yang ditentukan sebagai lokasi penelitian yakni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma dan Universitas Tridinanti Palembang dikarenakan merupakan Perguruan Tinggi favorit di Palembang yang banyak diminati generasi muda untuk menuntut ilmu serta banyak terdapat organisasi kemahasiswaan.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dari sudut pandang mahasiswa. Adapun judul penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang).

1.2. Perumusan Masalah

Keterlibatan perempuan di bidang kepemimpinan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena masih ada yang pro dan kontra, hal ini dipertegas Diana Dewi Sartika dalam buku Peranan Politik Perempuan bahwa kebijakan mengenai kuota 30% menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak terkait, mulai dari KPU, pengamat dan politikus, parpol, LSM dan juga dari aktivis perempuan sendiri. Seiring dengan gencarnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender maka perlu ada kajian yang khusus melihat tentang

bagaimana persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

1.3.2. Manfaat Penulisan

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan di bidang sosiologi khususnya mengenai sosiologi gender dan sosiologi politik pada masyarakat.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, khususnya yang terkait dengan masalah ini.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan yang berkenaan dengan permasalahan/isu perempuan terlebih dalam hal kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
2. Melalui tulisan ini diharapkan dapat membantu para perempuan agar lebih terbuka pikirannya untuk memperjuangkan haknya.

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Persepsi Mahasiswa

Persepsi berasal dari kata *perception* (bahasa Inggris) berarti penglihatan, tanggapan daya memahami atau menanggapi. Menurut Robbins (dalam Marhaeni, 2003 : 5), persepsi merupakan suatu proses individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu dan proses mengetahui beberapa hal melalui panca indera.

Proses persepsi dimulai dari perhatian yaitu proses pengamatan selektif. Faktor-faktor perangsang yang penting dalam perbuatan memperhatikan ialah perubahan, intensitas, ulangan, kontras dan gerak. Faktor-faktor organisme yang penting dalam pembentukan persepsi ialah minat, kepentingan dan kebiasaan memperhatikan yang telah dipelajari. Persepsi merupakan tahap kedua dalam

upaya menghayati lingkungan, mencakup pemahaman dan mengenali atau mengetahui objek-objek serta kejadian-kejadian.

Persepsi merupakan suatu proses pandangan seseorang (informan) melalui alat inderanya terhadap suatu objek tertentu (kepemimpinan perempuan). Pengetahuan sedikit banyak akan mempengaruhi pandangan seseorang dalam menginterpretasikan suatu objek stimulus tertentu yang akan menghasilkan suatu pemahaman. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia yang akan dijadikan acuan atau asumsinya dalam memandang sesuatu (dalam Marhaeni, 2003 : 7).

Persepsi, pengetahuan, pendapat serta sikap yang tidak sama ada kemungkinan hasil pandangan antara individu satu dengan yang lain tidak sama pula. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa pandangan itu bersifat individual. Adapun persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan ini termasuk kategori variabel tunggal karena bergantung pada pemahaman.

Pemahaman yang diinterpretasikan dalam perbuatan individu berkaitan dengan konsep Max Weber mengenai *verstehen* (pemahaman subjektif) pada tindakan sosial. Sosiologi menurut Weber merupakan ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami (*interpretive understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal (Ritzer, 1992:44). Weber juga berpendapat bahwa individu melakukan sesuatu berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran atas suatu objek stimulus atau situasi tertentu.



Berkenaan dengan persepsi, Robbins (dalam Marhaeni, 2003 : 7) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membentuk persepsi yaitu faktor pemersepsi, objek dan lingkungan. Faktor pemersepsi meliputi kepentingan/minat, pengalaman dan harapan. Faktor objek meliputi hal-hal baru, gerakan, bunyi, ukuran dan latar belakang. Sedangkan faktor lingkungan yaitu unsur situasi dalam lingkungan atau lingkungan terjadinya persepsi meliputi waktu, keadaan tempat dan keadaan sosial.

Berdasarkan pendapat di atas penulis menyimpulkan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu yang terletak pada pelaku persepsi, objek yang dipersepsi dan lingkungan terjadinya persepsi.

Pelaku persepsi adalah orang yang akan melakukan persepsi. Pelaku persepsi akan mempengaruhi apa yang akan dipersepsikannya, seperti kepentingan, pengalaman dan harapan. Masing-masing mahasiswa memiliki kepentingan, pengalaman dan harapan yang berbeda terhadap kepemimpinan perempuan karena itu persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan akan berbeda pula.

Objek yang dipersepsi adalah sesuatu yang menjadi target yang akan diamati oleh pelaku persepsi. Objek yang dipersepsi dalam penelitian ini adalah kepemimpinan perempuan. Adapun kepemimpinan perempuan yang dimaksud adalah kemampuan seorang pemimpin perempuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin perempuan tersebut.

Lingkungan terjadinya persepsi mencakup situasi dan waktu yang akan dipersepsi. Misalnya, kepemimpinan perempuan dari tahun ke tahun mungkin akan mengalami perubahan (kemajuan/kemunduran). Oleh karena itu lingkungan yang berubah-ubah akan menyebabkan persepsi mengalami perubahan.

Mahasiswa merupakan salah satu unsur dari kelompok generasi muda yang terdidik. Hal ini dilihat dari cara ia menanggapi sesuatu masalah di lingkungan sekitarnya dengan cara pandang tersendiri atau menurut kaca mata yang didasari oleh berbagai faktor pengalaman, tingkat intelektualitas dan wawasan. Pada akhirnya akan menimbulkan pemahaman tersendiri tentang suatu hal terhadap apa yang di pandang mahasiswa terlebih mereka sudah berada pada tataran ruang lingkup pergaulan pada pendidikan perguruan tinggi.

Menurut Sudarman (2004 : 32) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu perguruan tinggi. Sebagai pemuda, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai potensi serta dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Mulyani (2005), mahasiswa memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda-beda dengan anggota masyarakat lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai kecenderungan yang kuat untuk menafsirkan norma atau nilai yang diajarkan kepada mereka secara mutlak.
2. Kedudukan dan perannya hanya bersifat sementara karena dibatasi oleh waktu selama mereka studi.
3. Sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai golongan intelektual.
4. Cenderung berorientasi pada kelompok luar (*out group*) sebagai ukuran-ukuran perbandingan daripada berorientasi terhadap lingkungan sendiri.

Mahasiswa sebagai kelompok di masyarakat yang terdidik, dapat memilah-milah permasalahan relatif lebih benar. Kelebihan tersebut di dukung

oleh makna subjektif yang dimiliki mahasiswa yaitu dipercaya sebagai kekuatan moral yang mampu menjadi agen perubahan sosial (*agent social change*).

Menurut Arbi Sanit dalam Wena Dezantya K. Bhuwana (2005 : 13) ada lima sebab mengapa mahasiswa amat peka dengan permasalahan kemasyarakatan, yaitu:

1. Sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai pandangan luas untuk dapat bergerak di antara semua lapisan masyarakat.
2. Sebagai golongan masyarakat yang paling lama mengalami pendidikan, mahasiswa telah mengalami proses sosialisasi politik terpanjang diantara generasi muda.
3. Kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik di kalangan mahasiswa dan terjadi akulturasi sosial budaya yang tinggi di antara mereka.
4. Mahasiswa sebagai golongan yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur ekonomi dan akan memiliki keistimewaan tertentu dalam masyarakat adalah kelompok elit di generasi muda.
5. Seringnya mahasiswa terlibat dalam pemikiran, perbincangan dan penelitian berbagai masalah masyarakat, memungkinkan mereka tampil dalam forum yang kemudian mengangkatnya ke jenjang karir sesuai bidang keahliannya.

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil perbuatan memandang individu dalam memahami suatu objek stimulus yang diterimanya melalui indera. Berkaitan dengan individu yang akan melakukan persepsi, mahasiswa adalah subjek penelitian ini. Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini merupakan hasil perbuatan memandang mahasiswa dalam memahami suatu kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang diterimanya melalui indera.

1.4.2. Kepemimpinan Perempuan

Perempuan berderajat lebih rendah daripada laki-laki, inilah anggapan umum yang berlaku sekarang ini tentang kedudukan kaum perempuan dalam

masyarakat. Anggapan ini tercermin dalam prasangka-prasangka umum, seperti "seorang istri harus melayani suami". Tapi anggapan ini adalah anggapan yang keliru karena para ahli antropologi sudah menemukan bahwa keadaannya tidaklah selalu demikian.

Masyarakat Indian Iroquis pada abad ke-19 (http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/13/asal_usul_penindasan_perempuan) menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki benar-benar setara, terlihat dari semua orang dewasa otomatis menjadi anggota Dewan Suku yang berhak memilih dan mencopot ketua suku. Begitu juga dengan masyarakat Jermania dan suku-suku *Schytia* dari Asia Tengah, dimana perempuan dapat diangkat menjadi prajurit dan pemimpin perang.

Pada masyarakat nomaden, perburuan dan pengumpulan bahan makanan menjadi sumber penghidupan utama. Menurut data arkeologi, pertanian primitif hanya dikerjakan oleh kaum perempuan sebagai pengisi waktu senggang dan tidak dianggap sebagai satu hal yang terlalu penting untuk dapat dikerjakan oleh seluruh suku secara bersama-sama. Namun, ketika masyarakat menggeser prikehidupannya ke arah masyarakat pertanian, seluruh struktur masyarakat pun berubah termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pertanian kemudian menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dimana manusia harus menemukan cara-cara baru untuk mempertahankan hidup. Hal ini tentunya membuat pesat perkembangan teknologi di masyarakat pertanian. Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan pekerjaan dari komunal menjadi individual.

Apabila teknologi menurun, maka membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membuka lahan, sehingga aktivitas seksual pun menjadi satu aktivitas yang penting. Dengan demikian, kaum perempuan semakin tersingkir dari proses produktif di masyarakat karena waktu perempuan terserap ke dalam kegiatan-kegiatan reproduktif.

Meningkatnya teknologi pertanian membuat aktivitas produksi di sektor pertanian menjadi semakin tertutup bagi perempuan. Perempuan semakin tidak mampu berkecimpung di bidang produksi maka ia pun semakin tergeser ke pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah tangga). Ketika perempuan telah semakin terdesak ke lapangan domestik inilah patriarki mulai menampakkan batang hidungnya di muka bumi.

Penempatan perempuan pada posisi kelas dua dalam masyarakat berawal dari tergesernya peranan kaum perempuan dalam lapangan produksi. Selanjutnya pergeseran peran terjadi akibat tingkat teknologi yang tidak memungkinkan kaum perempuan memasuki lapangan produksi. Posisi kelas dua ini diperkukuh oleh sistem kepemilikan pribadi yang memunculkan berbagai prasangka, sistem nilai dan ideologi yang menegaskan paham keunggulan laki-laki dari perempuan.

Upaya pembebasan perempuan sesungguhnya telah diwujudkan oleh kapitalisme. Kapitalisme mengandalkan mesin sebagai alat produksi utamanya untuk memungkinkan kaum perempuan kembali berkarya di bidang produksi kebutuhan masyarakat. Bahkan sekarang di kota-kota besar sudah jarang ada kaum perempuan yang tidak memberikan sumbangan bagi perolehan kebutuhan hidup keluarganya. Lagipula, kapitalisme telah membuat sistem produksi menjadi

semakin lama semakin kolektif. Hampir tiap barang yang kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan hasil kerja ratusan bahkan ribuan orang. Hal ini pertanda bahwa sistem produksi komunal semakin hari semakin berjaya kembali.

Perkembangan kondisi objektif tersebut telah menghasilkan ruang yang sangat terbuka bagi perempuan. Gerakan emansipasi perempuan telah berkembang bersamaan dengan masuknya perempuan-perempuan ke pabrik-pabrik. Kini perempuan telah berhak turut serta dalam berbagai bidang pekerjaan. Kebanyakan perempuan juga telah bebas untuk memilih jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pasangan hidup dan jenis pekerjaan. Namun demikian, kondisi ini tidak menjadi pembebasan perempuan yang penuh karena sistem nilai di masyarakat masih merupakan sistem nilai yang mendukung adanya peminggiran terhadap peran perempuan.

Kapitalisme ditandai dengan pertumbuhan industri dan transformasi pertahanan telah mengubah pertanian subsisten/semi-subsisten menjadi pertanian yang berorientasi bisnis, selanjutnya terjadi perubahan pola pada relasi gender.

Pilihan menjadi wanita karir telah menjadi fenomena bagi sebagian wanita. Permasalahan wanita karir bukan lagi terletak pada apakah dia harus memilih menjadi wanita karir saja atau menjadi ibu rumah tangga saja. Kini, permasalahannya yang lebih aktual untuk dijawab adalah bagaimana peran sebagai ibu rumah tangga tetap dijalankan secara optimal ketika seorang wanita memutuskan untuk membina karir, terlebih bila posisinya sebagai pimpinan pada suatu instansi atau organisasi.

Menurut Abu Ahmadi, kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Sedangkan, menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang agar dengan suka rela bersedia menuju kenyataan tujuan bersama.

Kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi pihak lain berhubungan dengan kekuasaan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah patuh) dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Max Weber bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyandarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu (Soekanto, 2002 : 268). Sumber kekuasaan adalah hak milik kebendaan dan kedudukan yang salah satunya adalah birokrasi. Kekuasaan yang tertinggi berada pada organisasi yang dinamakan “negara”.

Penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR ialah Presiden sebagai Lembaga Eksekutif yang bertugas menyelenggarakan jalannya kehidupan bernegara mempunyai peran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan negara.

Lembaga Legislatif sebagai pembuat produk hukum yang keanggotaannya dipilih berdasarkan Pemilu dan selanjutnya digolongkan menjadi DPR yang

bersama-sama pemerintah membuat Undang-undang yang berkedudukan di ibukota negara, DPRD I berkedudukan di Kabupaten/Kota yang bersama-sama kepala daerah membuat Undang-undang untuk daerah dan menyusun APBD Provinsi, DPRD II yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan BPD di tingkat desa. Adapun alat kelengkapan DPR adalah Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antarparlemen dan Panitia Khusus.

Kekuasaan di bidang hukum dijalankan oleh Lembaga Yudikatif yang strukturnya Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara yang berkedudukan di ibukota negara, Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di tingkat Kabupaten/Kota. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka (lepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah).

Berkaitan dengan kepemimpinan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif tersebut, maka persyaratan utama calon pemimpin ialah dapat memimpin orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi dan dapat menjalin komunikasi antar-manusia karena organisasi selalu bergerak atas dasar interaksi antar-manusia.

Menurut O. Jeff Harris, orang-orang yang perlu dipilih sebagai kandidat-kandidat atau calon pemimpin adalah mereka yang mempunyai kualifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab.
2. Kemampuan untuk menjadi perseptif.
3. Kemampuan untuk menanggapi secara objektif.
4. Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat.
5. Kemampuan untuk berkomunikasi.

Hal tersebut dikarenakan fungsi dari kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, menjalankan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik; memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan (Kartono. 1994 : 81).

Secara sosiologis, tugas-tugas pokok seorang pemimpin menurut pandangan Soerjono Soekanto, (2002 : 294-295) adalah :

1. Memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya, dengan adanya kerangka pokok tersebut maka dapat disusun skala prioritas mengenai keputusan-keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata). Apabila timbul pertentangan maka kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Mengawasi, mengendalikan serta menyalurkan perilaku warga masyarakat yang dipimpinnya.
3. Bertindak sebagai wakil kelompok kepada dunia di luar kelompok yang dipimpin.

Setiap anggota mengetahui hasil apa, keyakinan apa dan kelakuan apa yang diharapkan dari mereka oleh pemimpin dan kelompoknya. Pemimpin diharapkan dapat mengambil tindakan-tindakan korektif apabila terdapat kepingangan dan penyimpangan dalam organisasi.

Jadi, tidaklah terdapat pembedaan gender mengenai siapa yang berhak menjadi seorang pemimpin. Namun, dalam kenyataannya di dalam masyarakat kita selama ini memang tidak ramah dengan kehadiran perempuan dan peran perempuan dalam ranah politik (Soetjipto. 2005 : 21), karenanya tidak terlalu salah jikalau kita masih bermimpi untuk memiliki pemimpin perempuan. Impian yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan adalah bertambahnya pemimpin

perempuan. Terbukanya kesempatan perempuan sebagai pemimpin, berarti terbuka pula kesempatan perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan (Murniati. 2004 : 55).

Menurut para teoritis seperti Margaret Fuller, Frances Willard, Jane Addams dan Charlotte Perkins Gilman mengatakan bahwa dalam mengatur negara, masyarakat memerlukan nilai-nilai perempuan seperti kerjasama, perhatian dan penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan (Ritzer. 2005 : 418). Selain itu surat kabar harian *Kompas* (26 November 2007 : 33) juga memaparkan bahwa ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan dan cenderung kolektif. Hal ini berbeda dari ciri kepemimpinan laki-laki yang kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat. Dengan demikian bisa dilihat bahwa ciri kepemimpinan yang kooperatif dan kolektif dapat digunakan untuk memberi tekanan pada logika sosial yang peduli pada distribusi yang adil dan solidaritas di tengah logika ekonomi yang menekankan persaingan demi efisiensi. Ciri lebih mengutamakan kesejahteraan dapat diarahkan untuk pembangunan fisik, ekonomi, juga perubahan karakter masyarakat agar tumbuh solidaritas untuk mengubah sikap yang mudah meminta dan menuntut, serakah dan mudah konflik.

Pemimpin adalah orang yang mampu menggabungkan pendekatan rasional dan logis dengan pendekatan intuitif. Intuisi diperlukan untuk dapat merasa, mengalami dan berelasi dengan lingkungan, disamping kepribadian yang jujur dan terbuka juga diperlukan. Hal ini dimiliki oleh hampir semua perempuan, dengan demikian modal utama sebagai pemimpin pun telah dimiliki.

Permasalahan mengenai kepemimpinan selama ini erat kaitannya dengan gender, dimana gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, gender membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara sosial (bukan kodrat), mengacu pada unsur emosional, kejiwaan dan sosial. Ada beberapa asumsi pokok gender, seperti (Murniati. 2004 : 60) :

1. Gender menyangkut kedudukan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat; hubungan laki-laki dan perempuan terbentuk secara sosiokultural dan bukan atas dasar biologis (alamiah).
2. Secara sosiokultural, hubungan ini mengambil bentuk dalam dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan.
3. Pembagian kerja dan pembedaan yang bersifat sosial sering kali dinaturalisasikan (dianggap "kodrat") melalui ideologi mitos dan agama.
4. Gender menyangkut stereotip feminin dan maskulin.

Konsep tersebut dalam perkembangan masyarakat patriaki (kekuasaan laki-laki) berbeda dengan kenyataan yang ada karena pola pikir dan pandangan kedua jenis kelamin berdasarkan ketidakadilan terlebih diperkuat oleh pandangan agama dan tradisi bahwa laki-laki "diakui dan dikukuhkan" untuk menguasai perempuan (Murniati. 2004 : XIX). Contohnya, marginalisasi terhadap perempuan yang menggeser perempuan ke pinggiran sehingga jika ada kesempatan untuk memimpin, perempuan selalu dinomorduakan sekalipun ia mampu melaksanakannya.

Struktur masyarakat patriaki saat ini perempuan tidak akan dapat maju jika tidak diberi kesempatan oleh laki-laki. Ada pun pengertian patriaki adalah suatu sistem yang bercirikan laki-laki (ayah) dimana laki-laki yang berkuasalah yang menentukan. Kekuasaan laki-laki atas perempuan inilah yang selanjutnya

menciptakan ketidakadilan gender dalam berbagai macam bentuk. Ketimpangan juga menyebabkan perempuan diposisikan subordinat sehingga menghalalkan tersingkirnya perempuan dari posisi-posisi tertentu.

Akhirnya pemerintah mengambil strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan yakni pengarusutamaan gender (PUG). Salah satu contohnya adalah kebijakan “kuota 30% perempuan”

Mengenai kaitannya dengan kepemimpinan, perempuan pun layak untuk menempati posisi tersebut tentunya dengan memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Perempuan harus dapat mengembangkan kemampuan akademiknya secara optimal, dapat bergaul dalam lingkungan yang kondusif sehingga mereka menjadi orang yang matang secara intelektual dan kepribadian. Bahkan jika itu terus didukung perempuan pun dapat menjadi pemimpin dan dihargai di masyarakat. Mereka tidak sulit memperoleh pekerjaan dan kekuasaan, selanjutnya dihargai sesuai tingkat pekerjaannya dalam bentuk pemberian imbalan yang layak.

Penelitian ini menjelaskan persepsi sebagai hasil perbuatan memandang individu dalam memahami suatu objek stimulus yang diterimanya melalui indera. Dalam hal ini persepsi mahasiswa merupakan hasil perbuatan memandang

mahasiswa dalam memahami suatu objek stimulus yang diterimanya melalui indera.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan perempuan adalah kemampuan dari seorang pemimpin perempuan untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin perempuan tersebut.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berkaitan dengan kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan di bidang pengetahuan serta kemampuan dalam manajemen organisasi. Selanjutnya peneliti juga mengkaji faktor-faktor yang turut mempengaruhi pembentukan persepsi mahasiswa tersebut.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Desain Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif berdasarkan fakta-fakta dan didasari oleh induktif analitik. Selanjutnya analisis data penelitian dilakukan secara induktif dengan alasan (Moleong, L. J. 2005 : 10), lebih dapat menemukan kenyataan ganda, membuat hubungan peneliti dengan informan menjadi *eksplisit* serta dapat dikenal, dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat-tidaknya pengalihan

pada suatu latar lainnya, dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan, serta dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

1.5.1.1.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kota Palembang yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi (STIE Musi), Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Universitas Bina Darma (UBD) dan Universitas Tridinanti Palembang (UTP). Adapun pemilihan lokasi ini dikarenakan universitas tersebut termasuk perguruan tinggi favorit diantara PTS yang lain serta memiliki unit organisasi kemahasiswaan yang banyak sebagai pengembangan diri mahasiswanya.

1.5.1.2.Sifat dan Jenis Penelitian

Format penelitian yang digunakan yaitu penelitian analisis induktif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif karena tujuan utama penelitian deskriptif adalah menggambarkan sifat suatu gejala tertentu. Dalam skripsi ini digunakan metode kualitatif untuk menggambarkan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Berdasarkan tempatnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena untuk mengumpulkan data, peneliti langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Konsep

wawancara telah dibuat terlebih dahulu oleh peneliti dan diklasifikasikan sedemikian rupa. Dengan demikian data dikumpulkan dari para informan. Adapun yang dikategorikan sebagai informan adalah mahasiswa S-1 dari keempat PTS di atas, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan serta aktif dan berkedudukan sebagai pengurus dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

1.5.2. Batasan Konsep

1. Persepsi adalah hasil perbuatan memandang individu dalam memahami suatu objek stimulus yang diterimanya melalui indera.
2. Mahasiswa adalah individu yang masih aktif belajar di Perguruan Tinggi.
3. Persepsi mahasiswa adalah hasil perbuatan memandang mahasiswa dalam memahami suatu objek stimulus yang diterimanya melalui indera.
4. Kepemimpinan perempuan adalah kemampuan dari seorang pemimpin perempuan untuk mempengaruhi orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut mau bekerjasama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pemimpin perempuan tersebut.
5. Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan agar dapat dipahami dan mempengaruhi orang lain sehingga terjalin kontak antar keduanya.
6. Kemampuan di bidang pengetahuan adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk dapat menganalisa dan menggunakan teknik/alat guna melaksanakan tugas-tugas terutama yang memerlukan metode, prosedur dan teknik.

7. Kemampuan manajemen merupakan kemampuan pemimpin untuk mengkoordinasikan seluruh rentetan kegiatan, keinginan dan kepentingan perorangan serta kelompok dalam pencapaian tujuan organisasi dengan melihat setiap permasalahan sebagai satu keseluruhan.

1.5.3. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu informan diambil berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti dengan persyaratan yang dibuat sebagai kriteria. Adapun informan ke-10 penelitian ini adalah mahasiswa S-1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma dan Universitas Tridinanti Palembang dengan kategori minimal semester empat dengan maksud mahasiswa yang bersangkutan telah mengenal sistem belajar di perguruan tinggi.

Informan dipilih diharapkan dapat ditemukan varian jawaban mengenai kepemimpinan perempuan. Mahasiswa yang menjadi informan adalah yang aktif dan berkedudukan sebagai pengurus dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.

1.5.4. Metode Pengumpulan Data

1.5.4.1. Unit Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok dari generasi muda yakni mahasiswa di Kota Palembang. Adapun yang termasuk dalam kategori mahasiswa ini adalah mahasiswa S-1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi,

Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Bina Darma serta Universitas Tridinanti Palembang.

1.5.4.2.Data dan Sumber Data

Jenis data yang diperoleh di sini ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kesepuluh informan melalui wawancara. Data sekunder berupa data penunjang di luar data primer yang digunakan dalam penelitian, diperoleh melalui studi pustaka; melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti : buku metode penelitian, buku mengenai kepemimpinan, perempuan dan generasi muda; surat kabar *Kompas*, internet serta monografi Kota Palembang.

1.5.4.3.Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara. Wawancara mendalam merupakan pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, wawancara sebagai alat utama dalam proses pengumpulan data. Wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah berupa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti (*guided interview*) dengan tujuan

agar memudahkan peneliti dalam proses penggalian informasi. *Guided interview* memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran, perasaan pengalaman hidup dan harapan tanpa adanya aturan dan paksaan dari peneliti.

2. Dokumentasi

Penelitian ini memanfaatkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber dan mempelajari sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti halnya data jumlah anggota parlemen perempuan dan laki-laki, data jumlah hakim, komposisi penduduk, data jumlah mahasiswa di STIE Musi, UMP, UBD, UTP serta data jumlah organisasi kemahasiswaan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini dilakukan pada kelompok yaitu mahasiswa di Kota Palembang khususnya mahasiswa. Interpretasi data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Sifat dari analisis deskriptif kualitatif bukan untuk menggeneralisasi dari data yang didapat tetapi hanya untuk menggambarkan varian-varian dalam kerangka holistik dari realitas sosial mengenai kepemimpinan perempuan.

Analisis dari kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu ;

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yang merupakan rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga keaslian datanya sehingga tidak mengubah makna sebenarnya.

2. Penyajian data adalah menyusun data serangkaian informasi yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.
3. Proses analisis yakni penarikan kesimpulan, dalam penelitian ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dengan berlangsung terus menerus mulai sebelum, saat dan sesudah pengumpulan data.

1.5.6. Sistematika

Adapun sistematika laporan penulisan skripsi tentang “Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif” (Studi pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota Palembang) yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang, perumusan masalah, yaitu pertanyaan pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta metodologi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan serta buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum singkat wilayah Kota Palembang, Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta Perguruan Tinggi Swasta yang dijadikan lokasi penelitian.

BAB IV : ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

Menggambarkan persepsi mahasiswa di perkotaan mengenai kepemimpinan perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

BAB V : PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta berisi saran yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak tertentu berkaitan dengan “Persepsi Mahasiswa di Perkotaan Mengenai Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif”.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmadi, Abu. 2002. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ancok, Djamaludin. 1995. *Nuansa Psikologi Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Badan Kepegawaian Daerah. 2008. *Keadaan Januari-Juni 2007*.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Palembang Dalam Angka Tahun 2007*.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006*.
- Badan Pusat Statistik. 2005. *Situasi Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004*. Palembang : CV. Kreasi Rifi.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Wanita dan Pria Sumsel*.
- Bintara, Johan. 2001. *PR Sosiologi*. Jakarta : PT Intan Pariwara.
- Budiyanto. 2003. *Tata Negara SMU*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Bugin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat. 1978. *Pembinaan Generasi Muda*. Surabaya : Study Group.
- Ilhami. 1995. *Buku Pintar Wanita Menjadi Pemimpin*. Surabaya : Karya Anda.
- Kartono, Kartini. 1994. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Kartono, Kartini. 2002. *Psikologi Sosial untuk Manajemen, Perusahaan dan Industri*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Marbun. 2005. *Kamus Politik*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Marsam, Surya Aditama, dkk. 2000. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Utama.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Murniati, Nunuk P. 2004. *Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga), Buku Kedua*. Magelang : INDONESIA TERATA.
- Ollenburger, Jane C, Helen A. Moore. 1996. *Sosiologi Wanita*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ridjal, Fauzie, dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana.
- Sartika, Diana Dewi. 2007. *Peranan Politik Perempuan Dinamika Gerakan Feminisme di Parlemen*. Jakarta : Elmatara Publishing.
- Satria, Yurni, dkk. 2003. *Modul Pengarusutamaan Gender*. Jakarta.
- Sigit, Soehardi. 2003. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : BPFEUST.
- Singarimbun, Marsi dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sudarman, Paryati. 2004. *Belajar Efektif Di Perguruan Tinggi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Sudiyono. 2004. *Majemen Pendidikan Tinggi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sumantri, Endang dan Idrus Affandi. 1986. *Buku Materi Pokok Pembinaan Generasi Muda*. Jakarta : Karunika.
- Suprpto, Tarwotjo, dkk. 1988. *Modul Materi Pokok Kepemimpinan*. Jakarta : Karunika.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta : Buku Kompas.

Sudarman, Dra. Paryati. 2004. *Belajar Efektif Di Perguruan Tinggi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta : Offset.

2. JURNAL

Selayang Pandang DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2006.

3. SURAT KABAR

Kompas. Senin, 26 November 2007. *Kepemimpinan Perempuan Sebagai Alternatif*.

4. SKRIPSI

Bhuwana, Wena Dezantya. 2005. *Sosialisasi Politik Partai Keadilan Sejahtera di Kalangan Mahasiswa Kota Palembang*, Jurusan Sosiologi, UNSRI.

Lestari, Prima Etty. 2005. *Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Usia Muda di Desa Inderalaya Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir*, Jurusan Sosiologi, UNSRI.

Marhaeni. 2003. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Kualitas Pelayanan Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, UNSRI.

Mulyani, Siti. 2005. *Bentuk-bentuk Adaptasi Sosial Mahasiswa Dengan Penduduk Asli Indralaya*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, UNSRI.

Theresia, Anita. 2004. *Pemberdayaan Perempuan di Partai Politik (Studi Tentang Pemberdayaan Perempuan di Partai Politik Golkar Kota Palembang)*, Jurusan Sosiologi, UNSRI.

5. TESIS

Sartika, Diana Dewi. 2007. *Peran Politik Perempuan di Parlemen Sumatera Selatan (Pasca Penerapan Affirmative Action pada Pemilu 2004)*, Program Studi Sosiologi, UGM. Tesis yang telah dipublikasikan.

6. LAPORAN PENELITIAN

Mardianto,dkk. 1991. *Persepsi dan Sikap Masyarakat Palembang Terhadap Biro Pelayanan Umum*. Penelitian SPP/DPP Unsri.

Semiawan R, Conny. 1999. *Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

7. INTERNET

<http://www.bkkbn.go.id>, download 4 Oktober 2007.

http://acehmarxist.wordpress.com/2007/12/13/asal_usul_penindasan_perempuan/, download 14 Maret 2008.

<http://nasrilbahar.wordpress.com/2008/04/29/uu-nomor-10/>, download 2 Mei 2008.